

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KECAMATAN TAMBELANGAN
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Tambelangan Tahun 2023 (LKjIP/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan Laporan Pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), yang dijabarkan melalui kebijakan yang telah ditetapkan, maupun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing seksi/bagian. Laporan Kinerja ini merupakan hasil dari salah satu tahapan penerapan Sistem AKIP, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7). Struktur organisasi Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum dan Informasi;
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial.;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Organisasi Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7). Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sampang. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

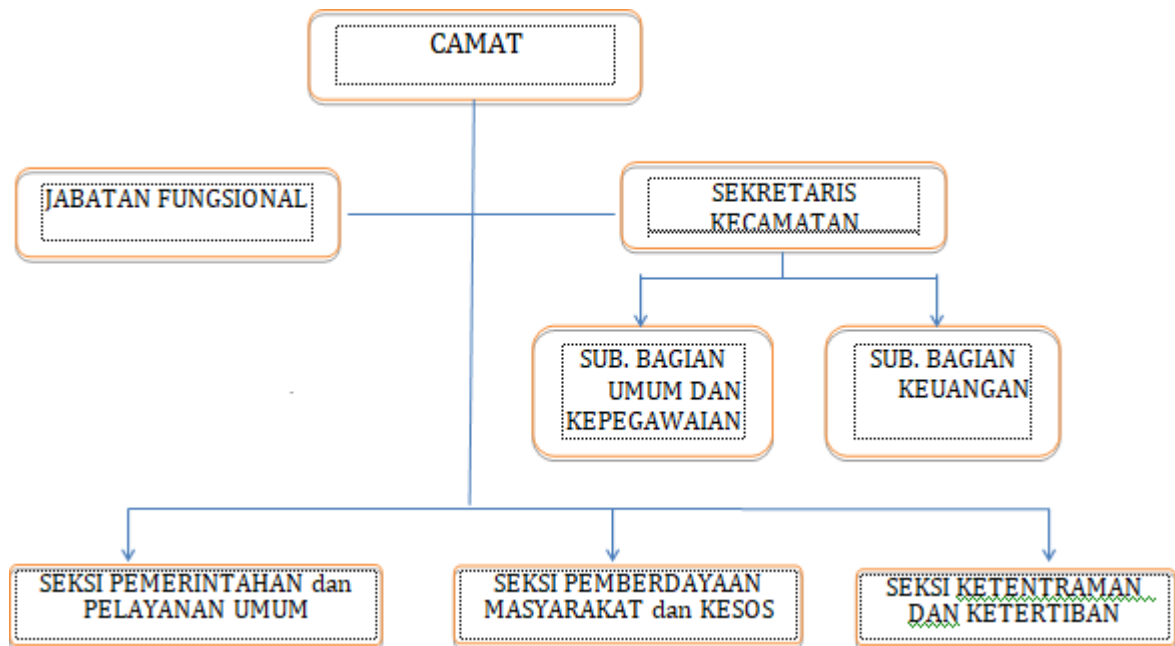
Untuk melaksanakan fungsi dimaksud, Kecamatan mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Guna melaksanakan tugas di atas, Camat dibantu oleh :

1. Sekretariat Kecamatan membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum dan Informasi;
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.



Yang terperinci dalam Tupoksi tiap seksi yang tersebut di bawah ini :

A. Sekretariat Kecamatan :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;

- c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan.
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan.
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ;
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan
- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber dayamasyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasilproduksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untukmeningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalampenghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakatDesa/ Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian

masyarakatDesa/ Kelurahan;

- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemdaan, peranan wanita dankegiatan olah raga;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan KeluargaBerencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkordinasi upaya peningkatan kesejahteraanmasyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalahkesejahteraan masyarakat;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. ISU STRATEGIS KECAMATAN TAMBELANGAN

Isu-isu strategis dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tambelangan perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Tambelangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan	Faktor Internal: Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
2.	Gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Tingkat Kriminalitas Masih Terlalu Tinggi	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Tambelangan dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Faktor Eksternal: Kondisi Perekonomian yang sangat sulit pasca terjadinya Pandemi Covid-19
3.	Tata kelola pemerintahan desa yang relative kurang baik	Pelayanan administrasi di desa kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Tambelangan dalam melaksanakan Pembinaan Faktor Eksternal: Kurangnya pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas pokok dan Fungsinya
4.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan rendah	Tingkat Kehadiran dalam Musdes rendah	Faktor Internal: Kondisi geografis yang kurang mendukung Faktor Eksternal: Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pembangunan

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
- b. SDM pada Kecamatan Tambelangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas
- c. Aplikasi teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang kurang optimal

d. Terbatasnya tenaga keamanan di desa

D. CASCADING KINERJA KECAMATAN TAMBELANGAN

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Tambelangan selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.



CASCADING / POHON KINERJA KECAMATAN TAMBELANGAN

TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM		KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan.	Nilai IKM Kecamatan Tambelangan	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Tambelangan	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan (Dihitung dari persentase kehadiran kegiatan: a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan) b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan c. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan paket
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	a) Jumlah Satlinmas yang aktif b) Jumlah Poskamling yang aktif	a) ... b) ...
						Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	a) Jumlah desa dengan administrasi yang baik b) Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	a) ... Desa b) ... Desa
					Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Fasilitasi administrasi pelayanan umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%
						Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	a) Jumlah pra musrenbangcam b) Jumlah musrenbangcam c) Laporan hasil musrenbangcam	a) 1 kali b) 1 kali c) 1 dok
				Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	a. Jumlah surat terkirim b. cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi c. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan d. Jumlah tenaga kebersihan e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	a. surat b. 12 bulan c. Unit d. ob e. Unit f. ob
						Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	a. Jumlah ATK b. Jumlah barang cetakan c. Jumlah barang penggandaan d. Jumlah komponen instalasi listrik e. Jumlah	a. jenis b. jenis c. jenis d. unit e. bulan

							pemenuhan f. Jumlah Pemenuhan bahan bacaan.	f. ok
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	a. Jumlah koordinasi dalam daerah b. Jumlah koordinasi luar daerah	a. ok b. ok
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Pembangunan/Reha b/ Pemeliharaan Gedung Kantor	a. Jumlah gedung kantor yang dibangun b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	a. unit b. unit
						Pembangunan/Reha b/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	a. Jumlah Rumah dinas yang dibangun b. Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	a. unit b. unit
						Pengadaan/Pemelih araan Kendaraan Dinas Operasional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan b. Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan b. Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	a. unit b. unit
						Pengadaan/Pemelih araan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor d. Jumlah spanduk/umbul- umbul/bendera yang disediakan	a. unit b. unit c. unit d.unit
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/S eminar	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi/se minar ok
				Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 dok
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 dok
						Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	a. Jumlah Dokumen SKM b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	a. 1 dok b. kali

E. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN TAMBELANGAN

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah.

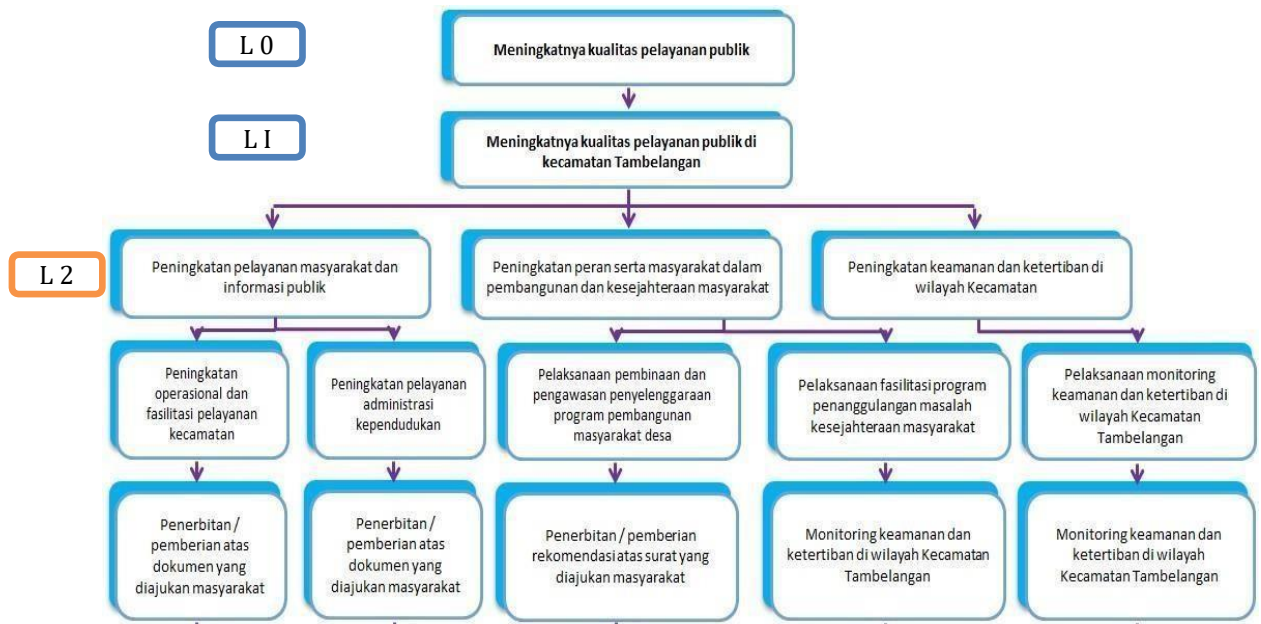
Jika proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang :

INTI PROSES BISNIS KECAMATAN TAMBELANGAN



L 3

Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor : 065/450.34/434.100/2023 tanggal 02 November 2023, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah memenuhi kriteria namun terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan yaitu :

- Rumusan tujuan belum berorientasi hasil
- Indikator tujuan hanya mengukur aspek pelayanan saja
- Indikator kinerja belum dapat diukur karena pelayanan di Kecamatan tidak relevan dengan indicator IKM

B. Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pengukuran

Pengukuran Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi Informasi

2. Implementasi Pengukuran

- a) Tidak semua target kinerja eselon III dan IV telah dimonitorpencapaiannya setiap bulan
- b) Hasil pengukuran capaian kinerja belum dikaitkan denganreward dan punishment
- c) IKU belum direviu secara berkala

C. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya

D. Evaluasi Internal

1. Kualitas Pengukuran

Evaluasi dan pemanfaatan atas pelaksanaan Rencana Aksi belumdilakukan.

2. Pemanfaatan Pengukuran

Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk nyata.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Mengacu visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2, 4 dan 5** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa”, “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”, “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa”, dan “Penurunan angka kriminalitas”** . Sehingga penjabaran atas sasaran P- PRPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Tambelangan dalam kurun waktu 2019-2024.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Maju
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. Sejalan dengan

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran & Target Jangka Menengah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2023	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan dan Sasaran :									
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	60,01	60,01	65,00	70,00	70,00	70,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	-	-	-	57,00	71,00	85,00	100,00	100,00

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon III) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar total anggaran Rp 2.337.667.146.00 terdiri Belanja Langsung sebesar Rp 2.337.667.146.00 yang digunakan untuk melaksanakan 12 kegiatan yang terangkum dalam 2 (dua) program sebagai berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM Kecamatan Tambelangan	81,50
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Presentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 2,222,884,249,00	APBD/DAU
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan publik	Rp 5,778,348,00	APBD/DAU
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp 65,793,869,00	APBD/DAU
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp 18,675,000,00	APBD/DAU
5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp 24,535,680,00	APBD/DAU

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2023, kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, yaitu sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2023 akan kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) harus berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang meliputi : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Oleh karena itu dalam penyusunan LKJIP tahun 2023 ini digunakan indikator-indikator sebagaimana dimaksud. Hasil perhitungan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagaimana uraian dibawah ini.

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing sub bagian yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran kinerja sasarannya dibandingkan dengan target tingkat capaian kinerja yang telah ditentukan.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Kecamatan Tambelangan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas dengan melaksanakan pelayanan yang meliputi :

1. Pelayanan di bidang Umum ;
2. Pelayanan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum ;
3. Pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
4. Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Adapun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jenis
Pelayanan

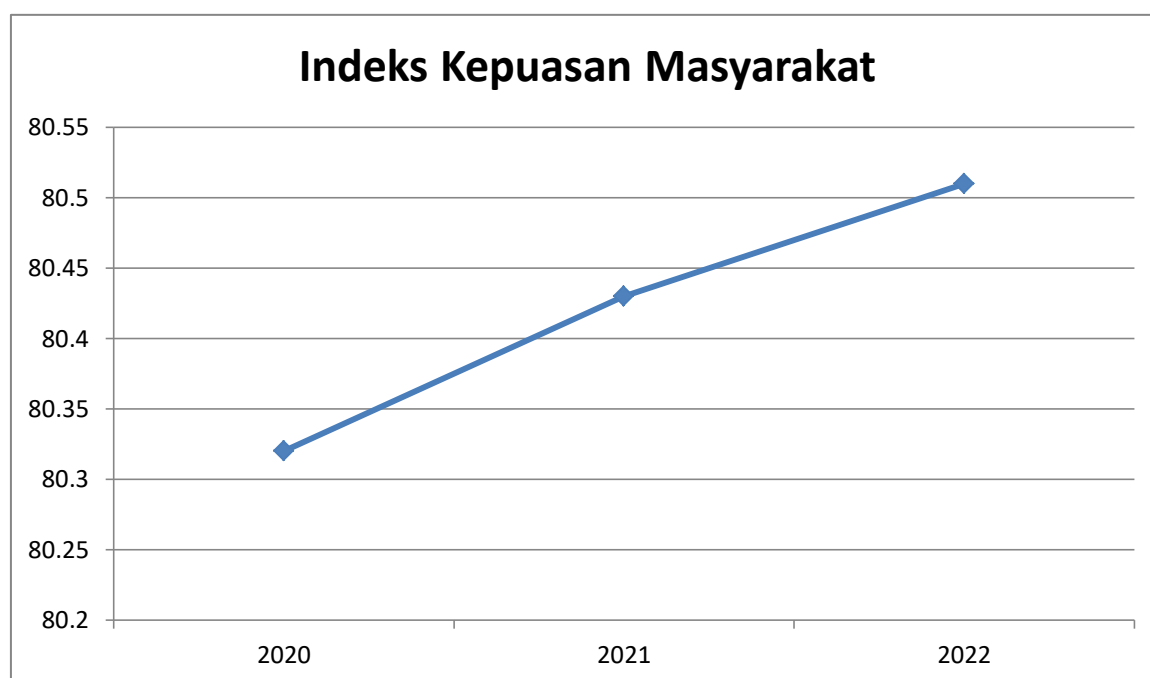
NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	WAKTU
1	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Pengurusan Rekomendasi Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat, Masjid, dll	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
2	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Pembuatan Surat Keterangan Pindah Penduduk	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan	23 Menit
		Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran	Surat Edaran Bupati Sampang Tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 470/35/434.105/2014 tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	20 Menit
		Pengurusan Surat Pernyataan Waris	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	35 Menit
3	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Surat Keterangan Bersih Diri	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang Kecamatan dan Kelurahan	10 Menit
4	Subag Umum dan Kepegawaian	Pengurusan Surat Keterangan dan legalisasi surat lainnya	Peraturan Bupati No 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang	10 Menit

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambelangan Tahun 2023, sasaran yang telah ditetapkan dan diukur tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambelangan Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50
2	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %

- a) Untuk Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, memiliki uraian indikator sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Tambelangan pada tahun 2021 adalah 80,43 sedangkan di tahun 2023 ditargetkan 81,50. Namun Realisasi IKM pada tahun 2023 adalah 80,51 atau 93,32% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian terjadi Penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar -7,96 atau - 7,97% dari Tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Tambelangan dapat ditampilkan dengan grafik dibawah ini :



Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	2019	2020	2021	2023
			(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	81,50	80.45	80.32	80.43	80,51

b) Untuk Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dengan Sasaran 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, memiliki uraian indikator sebagai berikut : Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2021 adalah 44,44% sedangkan di tahun 2023 ditargetkan 44,00%. Namun Realisasi Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2023 adalah 44,44% dari target yang telah ditetapkan, hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 9 Desa yang dibina Administrasi terdapat 4 desa yang sudah tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Adapun kendala yang dihadapi adalah belum semua perangkat daerah melaporkan Penilaian Prestasi Kerja secara tepat waktu sehingga rekapitulasi data tidak optimal.

Upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan *reward and punishment* bagi ASN;
- b. Peningkatan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan cara pembinaan/pengawasan secara berkala dan pelaksanaan kegiatan sidak.

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun- tahun sebelumnya (3 tahun sebelumnya 2019-2021), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET2023	2019	2020	2021	2023
			(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	81.50	80.45	80.32	80.43	80,51
Meningkatnya tata kelolapemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %	0	33,33%	44,00 %	44,00 %

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	80,51	93,32%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	100,00%	44,00 %	44,00%

Dari tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (*benchmark kinerja*), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI NASIONAL	KET
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,51	-	Tidak tersediadata
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %	-	Tidak tersediadata

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Tambelangan dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2023 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

Tabel 3.6.
Alokasi per Sasaran Pembangunan (*Cost per outcomes*)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5,778,348	0,66%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	24,535,680	7,25%

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah, yaitu Rp. **2,337,667,146** (termasuk anggaran Sekretariat / Program Adum). Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran

pembangunan atau *cost per outcome* dari masing-masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	80,51	96,99%	5,778,348	4,340,500	75.12%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %	44,00 %	100,00%	24,535,680	14,699,050	59.91%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.8.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,99%	75.12%	0,91%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	100,00%	59.91%	0,24%

Berdasarkan tabel 3.8. diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang tahun 2023 dalam kategori berhasil karena capaian yang mencapai lebih 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

Kemudian Secara Umum tidak terdapat Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

B. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 :

1. Secara umum terdapat peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Tambelangan meskipun belum signifikan, Kecamatan Tambelangan telah menyusun RPJMD dengan ukuran keberhasilan yang lebih baik, akan tetapi perlu dibuktikan lagi keberlanjutan atas dokumen perencanaan yang telah disusun.
2. Usulan Pembangunan yang tertera dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi dasar pembangunan kinerja tahun berkenaan. Hal ini tersebut terlihat pada proses penganggaran dan program prioritas.
3. Perencanaan Kinerja dan peta proses bisnis Kecamatan Tambelangan belum dijabarkan dengan baik pada dokumen penganggaran.

C. Upaya perbaikan SAKIP Tahun 2023 :

1. Menyempurnakan peta proses yang ada dengan mencermati kembali hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan Pemerintahan Kecamatan Tambelangan dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan cascading kinerja serta evaluasi
2. Meningkatkan upaya implementasi manajemen kinerja dengan menggunakan dokumen perencanaan benar-benar sebagai pedoman pelaksanaan kerja
3. Dalam rangka optimalisasi implementasi SAKIP, diperlukan aplikasi manajemen kinerja yang diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai dasar perencanaan kinerja

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain melalui program :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

D. REALISASI ANGGARAN

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelangan dengan total anggaran Rp 2,337,667,146,00 terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 2,337,667,146,00 Terealisasi sebesar Rp 2,200,395,733,00 (94.13%) Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan.

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2023

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	2,337,667,146	2,200,395,733	94.13 %
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,222,884,249	2,104,673,683	94.68 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	20,043,447	10,359,500	51.69 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,874,091	1,813,000	96.74 %

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,490,417	1,391,000	93.33 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,966,136	1,859,000	94.55 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	303,944	300,000	98.70 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,408,859	4,996,500	34.68 %
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,739,818,126	1,707,220,843	98.13 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,737,686,204	1,705,565,293	98.15 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,723,548	1,279,800	74.25 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	408,374	375,750	92.01 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,097,347	-	0.00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3,097,347	-	0.00%
	Adminstrasi Umum Perangkat	105,130,135	75,217,531	71.55 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,099,722	3,255,729	79.41 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,408,312	12,770,600	88.63 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,004,484	17,886,200	74.51 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,500,000	430,000	17.20 %
		7,202,250	6,789,250	94.27 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,800,000	1,680,000	93.33 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,200,000	6,732,000	93.50 %

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,542,367	8,555,252	89.66 %
		7,200,000	6,384,500	88.67 %
		14,400,000	4,100,000	28.47 %
		12,773,000	6,634,000	51.94 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108,603,308	103,659,000	95.45 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66,000,000	61,200,000	92.73 %
	Pengadaan Mebel	8,103,308	7,990,000	98.60 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,500,000	34,469,000	99.91 %
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	66,782,460	42,064,392	62.99 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,395,260	2,336,050	97.53 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,387,200	6,728,342	21.44 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,000,000	33,000,000	100.00 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170,310,000	157,259,917	92.34 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,200,000	1,149,000	27.36 %
	Pemeliharaan Mebel	1,600,000	1,090,000	68.13 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000	3,700,000	37.00 %
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29,510,000	26,949,917	91.32 %
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125,000,000	124,371,000	99.50 %

	Penataan Organisasi	9,099,426	8,892,500	97.73 %
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	463,776	305,000	65.76 %
		8,635,650	8,587,500	99.44 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5,778,348	4,340,500	75.12 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yg ada di Kec.	5,778,348	4,340,500	75.12 %
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masy. di Wilayah Kec.	5,778,348	4,340,500	75.12 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65,793,869	58,137,250	88.36 %
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65,793,869	58,137,250	88.36 %
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18,070,194	17,783,000	98.41 %
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47,723,675	40,354,250	84.56 %
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18,675,000	18,545,250	99.31 %
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	18,675,000	18,545,250	99.31 %
	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kec.	18,675,000	18,545,250	99.31 %
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	24,535,680	14,699,050	59.91 %

PEMERINTAHAN DESA				
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	24,535,680	14,699,050	59.91 %
	Fasilitasi Adminstrasi Tata Pemerintahan Desa	13,617,840	11,318,050	83.11 %
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa	10,917,840	3,381,000	30.97 %
	JUMLAH BELANJA	2,337,667,146	2,200,395,733	94.13 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

Penjelasan umum realisasi serapan anggaran program pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya dikatakan BAIK , dimana program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (94.68%%), Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (75.12%), Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (88.36%), Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (99.31%) dan Program dan pengawasan pemerintahan desa (59.91%).

E. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Menyempurnakan peta proses yang ada dengan mencermati kembali hal- hal yang

seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Tambelangan dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan cascading kinerja serta evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah

2. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam perumusan tujuan dan indikator tujuan yang berorientasi pada hasil

B. Pengukuran Kinerja

1. Telah diupayakan tindak lanjut pengukuran kinerja dalam bentuk evaluasi internal terhadap kinerja eselon III dan IV setiap bulannya.
2. Punishment diberikan kepada ASN berupa pemotongan TPP sesuai ketentuan.
3. Reviu IKU dilaksanakan setiap triwulan dalam bentuk evaluasi internal setiap seksi dan sub bagian.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja diupayakan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lengkap dengan basis data yang memadai.

D. Evaluasi Internal

Pemantauan Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan telah dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Sebagai bentuk dari perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara utuh dan riil telah disampaikan pada laporan LKjIP ini. Oleh karena keterbatasan pengetahuan kami dalam penyusunan laporan ini, maka kami menganggap bahwa kritik dan saran yang membangun masih sangat kami butuhkan demi kesempurnaan dan perbaikannya pada masa-masa yang akan datang.

B. TINJAUAN KHUSUS

Penetapan indikator-indikator kinerja yang dicapai sebagai acuan tingkat keberhasilan pencapaian kebijakan, program dan kegiatan diperoleh dari pandangan dan pemikiran yang didasarkan pada fungsi-fungsi yang ada pada lingkungan organisasi Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.

Pengukuran kinerja ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran yang bersifat berkelanjutan, sehingga perlu terus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator-indikator kinerja yang benar-benar realistis.

LKjIP merupakan media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana kebijakan, program dan kegiatan yang strategis mampu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi serta perbaikan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

Pada akhir tahun Kecamatan Tambelangan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan

maupun kinerja. Hal yang perlu dipertimbangkan pula bahwa setiap seksi teknis yang ada di kecamatan selalu dan senantiasa ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, Kecamatan Tambelangan terus melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah- langkah yang diambil yaitu dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, counseling serta penyuluhan sarana dan prasarana baik dari sisi aparatur maupun teknis pelayanan yang kesemuanya tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.